





GUBUK: Sihono, 60 tahun, beraktivitas di dekat gubuk tempat tinggalnya di bantaran Sungai Winongo, kawasan Jatimulyo, Kecamatan Tegalrejo, Jogja kemarin (15/7).

Masyarakat (BPM). "Peruntukannya untuk kegiatan yang secara langsung berkontribusi terhadap penanganan dan pengurangan kumuh," tuturnya.

Menurut dia, ada 11 kelurahan yang menjadi fokus. Masing-masing kelurahan mendapat alokasi dana BPM sebesar Rp 17,5 Miliar dan dana Pe-

ingkatan Kapasitas Masyarakat (PKM). Dedi menyebut, anggaran terkecil Rp 500 juta untuk Kelurahan Notoprajan, dan yang terbesar yakni Rp 2 Miliar

untuk Kelurahan Prenggan, Klitren, Tegalrejo, Pringgokusuman, Wirogunan, Bumijo, dan Cokrodingratan. Sedangkan dana PKM dengan total Rp 110 juta untuk 11 Kelurahan yang masing-masing Kelurahan menerima alokasi dana Rp 10 juta. Dana PKM ini untuk dimanfaatkan sebagai Peningkatan Kapasitas Masyarakat untuk beberapa jenis kegiatan pelatihan.

Dedi juga mengatakan beberapa indikator yang menjadi faktor penyebab wilayah itu menjadi kumuh yaitu dengan melihat kriteria sesuai tujuh indikator plus 1. Di antaranya bangunan, jalan, drainase, air minum, limbah, persampahan dan proteksi kebakaran serta Ruang Terbuka Hijau atau Publik. Jika diperinci lagi, lanjut dia, ada 19 kriteria dari bangunan itu sendiri seperti mulai dari kriteria ketidakteraturan, ketiakyatakan, dan kepadatan bangunan, dan sebagainya.

Dia menyebut setiap wilayah memiliki faktor tertentu yang menyebabkan wilayah itu menjadi disebut lokasi kumuh. "Kebanyakan yang

mensuport dan memberikan kontribusi skor kumuh adalah sampah dan proteksi kebakaran," tuturnya

Salah satu peserta BKM Tegajrejo, Oleg Johan mengaku optimis bisa mengejar target 0 hektar disebut wilayah kumuh. Dimana wilayah Kelurahan Tegajrejo sudah mencapai 80 persen untuk pengentasan wilayah kumuh. Tinggal untuk mengejar 20 persen keteringgalan yang ada pada empat RW. "Optimis pasti, karena sebenarnya ketika pembangunan itu berdampak pada masyarakat langsung kan tidak hanya sekedar faktor fisik saja yang terbangun tapi juga sosial dan ekonominya," ungkap caleg terpilih DPRD Kota Jogja itu.

Tegalrejo sendiri menerima alokasi dana paling besar sebesar Rp 2 Miliar dibagi menjadi empat RW. Alokasi itu digunakan untuk Pembuatan drainase, jalan setapak, dan beberapa RTH, serta penataan kawasan kumuh berupa pemagaran jalan agar tidak dibuat untuk pembuangan tempat sampah. "Semoga sisanya ini kami bisa mengejar," harapnya. (cr15/pr/er)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas PUPKP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005